

Analisis Framing Kasus Korupsi Menteri Kominfo Johnny G Plate

Agung Pangeran Bungsu¹, Fohan Muzakir²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh,

¹Email: agung@kampusummah.ac.id

ABSTRACT

When corruption is mentioned in the news, nearly everyone in society pays attention. The media exerts the most power on how the subtleties of news building are enjoyed by the audience. Will the audience accept what is presented or the other way around. This essay analyzes Robert Entman's framing of the corruption case of Minister of Communication and Informatics Johnny G. Plate Secretary General of the National Democratic party made by Surya Paloh. Robert Entman's framing is built on four levels: define problem, diagnose cause, make moral judgment and treatment recommendation. It was determined that the news coverage on Tempo.co and Metro TV contradict each other under Robert Entman's four framing configurations. Beginning with the opening of Metro TV's news, it provided a defense justification for the suspect. Politicians did not get involved until Plate's price tag made handcuffing impractical. While government officials of the class of assistant ministers to the president also receive the same treatment before the law, Tempo.co implicitly seeks to educate readers through the analysis' results about who the corrupt individuals are who act and act against the interests of the state.

Keywords: Johnny G Plate Corruption; Johnny G Plate Suspect; Framing Plate Analysis.

ABSTRAK

Pemberitaan tentang korupsi adalah pemberitaan yang cukup menarik perhatian hampir seluruh lapisan masyarakat. Media merupakan kontrol utama untuk meyakinkan bagaimana nuansa konstruksi pemberitaan sampai kepada khalayak untuk dinikmati. Apakah khalayak akan meyakini apa yang dikonstruksikan atau malah sebaliknya. Tulisan ini berisi tentang analisis framing Robert Entman yang dibangun atas empat tingkatan *define problem, diagnose cause, make moral judgment* dan *treatment recommendation* terhadap konstruksi pemberitaan kanal youtube Tempo.co dan Metro TV kasus korupsi menteri Kominfo Johnny G Plate sekretaris jenderal partai Nasional Demokrat besutan Surya Paloh. Ditemukan simpulan dalam empat

tatanan framing Robert Entman bahwa antara pemberitaan Tempo.co dan Metro TV bersebrangan. Dimulai dari bagian awal pemberitaan Metro TV memberikan framing pembelaan untuk tersangka. Tidak benar ada intervensi politik hingga Plate terlalu mahal untuk diborgol. Sedangkan Tempo.co secara tersirat lewat hasil analisis berupaya mengedukasi pembaca bahwa siapa saja pelaku korupsi yang berbuat dan bertindak sehingga merugikan negara, meskipun pejabat pemerintah sekelas menteri pembantu presiden juga mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kata Kunci: Korupsi Johnny G Plate; Johnny G Plate Tersangka; Analisis Framing Plate.

PENDAHULUAN

Kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 mendatang memberikan banyak warna bagi kondisi rezim saat ini. Padahal tugas dan janji-janji manis kampanye dua periode yang lalu masih belum dapat diselesaikan. Khalayak dibuat tercengang dengan berbagai prioritas yang mengatasnamakan rakyat, nyatanya apa yang dilakukan hanyalah untuk kepentingan segelintir elit politik. Rotasi jabatan yang terjadi kapan saja mengisyaratkan bahwa siapa saja dapat menduduki kursi pejabat apabila memiliki relasi baik pada rezim penguasa. Apapun latar belakangnya baik dari kalangan akademisi, politisi, maupun praktisi dapat dengan mudah melenggang berkuasa tanpa harus melewati proses yang rumit. Tentu saja dengan restu dan negosiasi dari para elit politik, seseorang dapat memperoleh tiket dalam menjalankan mesin politik yang sedang bekerja.

Media menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Hal ini disebabkan karena media memegang peranan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat. Gejolak yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat dapat diatur dengan mudah oleh rezim lewat media sesuai dengan pesanan dan keinginan elit politik negeri. Apabila penguasa ingin memberikan citra positif pada masyarakat luas, maka media

merupakan kontrol yang ampuh untuk mengatur stigma pada masyarakat. Kemampuan media untuk mengubah opini publik dengan argumentasinya adalah bentuk lain dari pengaruh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para elit politik berlomba-lomba untuk menguasai media yang sudah ada di masyarakat, jelas dengan maksud menggunakannya untuk propaganda, pencitraan, bahkan untuk menyembunyikan kesalahan yang sebenarnya. Jika ada media yang tidak berimbang memberikan informasi yang sama tentang korupsi misalnya, hal itu sudah menjadi rahasia umum ada kaitan erat dengan para elit di balik media. Secara keseluruhan ini semua merupakan upaya untuk menjaga persepsi masyarakat terhadap pejabat publik.

Tingginya angka korupsi yang terjadi pada rezim hari ini tentu saja menggoreskan tinta hitam dalam catatan sejarah. Bagaimanapun korupsi merupakan kejahatan yang tidak dibenarkan. Hal ini dijelaskan dengan rinci dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang RI, 2001). Para pelaku korupsi bukanlah orang-orang biasa, melainkan mereka pejabat publik yang seharusnya memberikan teladan bagi keberlangsungan bangsa ini. Sulit rasanya menemukan lembaga negara yang benar-benar terbebas dan bersih dari kasus korupsi. Perbuatan buruk ini seakan telah mengakar hingga ke dasar tatanan kehidupan dalam masyarakat. Mulai dari lembaga legislatif, yudikatif, hingga eksekutif tidak jauh dari persoalan korupsi. Hal yang sangat menyediakan pula mereka para pemegang kekuasaan yang seharusnya bekerja untuk melaksanakan kehendak rakyat malah menyalahgunakan wewenangnya. Kedudukan digunakan sebagai alat untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, atau bahkan partai pengusungnya hingga duduk menjabat. Tentu saja ini adalah tindakan yang buruk untuk menindas rakyat biasa.

Korupsi yang dilakukan oleh para menteri pembantu presiden di lembaga eksekutif berulang kali terjadi pada rezim hari ini. Mulai dari Idrus Marham, mantan Menteri Sosial dari Partai Golkar (Golongan Karya), adalah menteri rezim Jokowi yang pertama tersandung kasus korupsi. Dia didakwa melakukan korupsi pada periode kabinet “Indonesia Maju” 2014-2019. Kemudian, gugatan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang juga diseret pada kabinet “Indonesia Maju” 2014-2019. Kasus korupsi berikutnya menyeret nama Edhy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, berasal dari Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) yang tersangkut kasus korupsi pemerintahan “Indonesia Maju” 2019-2024. Kasus korupsi Juliari Batubara, Menteri Sosial dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), pada masa pemerintahan Kabinet “Indonesia Maju” jilid 2, merupakan kasus yang sangat luar biasa. Terjadi pada saat rakyat Indonesia sedang tertimpa musibah besar Covid-19 (Bungsu, 2019). Meskipun pada rezim sebelum-sebelumnya juga sempat terjadi peristiwa serupa.

Berbicara soal latar belakang para menteri yang telah melakukan tindak pidana korupsi seluruhnya adalah anggota partai politik. Baik mereka yang berasal dari partai nasionalis maupun dari partai politik kelompok tertentu. Apapun alasannya korupsi adalah tindak kejahatan yang tidak dibenarkan menurut perundang-undangan. Lantas bagaimanakah perananan yang dimainkan oleh presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan. Apakah tugas dan tanggung jawab presiden hanya cukup sebatas memilih lantas memberhentikan para menteri yang ada dalam kabinet. Bukankah seharusnya presiden harus ikut bertanggung jawab atas kejahatan terstruktur ini. Bagaimana nasib bangsa ini ketika kursi para menteri diisi oleh mereka

yang tidak memiliki kualifikasi dan tidak mampu mengakomodasi persoalan di negeri ini. Sampai kapan kursi pejabat setingkat menteri terus saja diisi oleh orang titipan partai atas janji-janji elit politik.

Tulisan ini akan meninjau bagaimana korupsi yang menimpa menteri rezim Jokowi pada pertengahan bulan Mei 2023. Tepat pada 17 Mei 2023 Kejaksaan Agung menetapkan Johnny G Plate Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai tersangka proyek pembangunan menara (BTS) Base Transceiver Station. Johnny G Plate ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung setelah melewati proses pemeriksaan. Johnny merupakan politisi partai Nasdem, Nasional Demokrat yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Partai besutan Surya Paloh. Jumlah kerugian yang dialami negara ditaksir mencapai 8 triliun, ini merupakan angka fantastis dengan kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini. Kejadian ini tentu saja menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, khususnya kepada para menteri. Hal ini tentu saja menjadi sorotan khalayak karena partai Nasdem atau Nasional Demokrat menjadi salah satu partai oposisi pemerintah di periode kedua kabinet Jokowi. Dibalik tindak pidana korupsi Johnny G Plate beserta rombongannya yang diungkap oleh lembaga negara Kejaksaan Agung tentu saja tidak dapat dipisahkan dari iklim politik pada rezim Jokowi hari ini. Sikap independensi yang berupaya ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung tetap menjadi sorotan publik. Apakah hal ini murni pengusutan tindak pidana korupsi atau memang penangkapan Johnny G Plate beserta rombongannya merupakan upaya menjatuhkan partai oposisi pemerintah Nasional Demokrat.

Berita tentang kasus korupsi Johnny G Plate ini tentu saja dimuat dalam banyak media, khususnya media mainstream Tempo.co dengan memberi judul “Johnny G Plate Tersangka Kasus Menara BTS, Langsung Ditahan” yang

diunggah di kanal youtube Tempo.co tepat pada tanggal 17 Mei 2023. Berita tentang Johnny juga diunggah di hari yang sama pada media mainstream lainnya yaitu pada kanal youtube Metro TV yang diberi judul “Plate Tersangka, Tidak Ada Intervensi Politik?”. Kedua media di atas tentu mempunyai pandangan dan tujuan berbeda meskipun mengkaji satu berita yang sama pada tanggal 17 Mei 2023. Perbedaan gaya pemberitaan berkaitan erat dengan framing. Adapun framing adalah teknik yang dapat dilakukan oleh media untuk menghiasi wajah pemberitaan dengan tujuan tertentu salah satunya dalam mendorong opini publik (Hafidli et al., 2023).

Robert Entman dalam banyak literatur menerangkan bahwa framing merupakan proses menggabungkan konsep tekstual yang meliputi kata serta gambar. Robert Entman juga menambahkan bahwa framing adalah upaya untuk mempengaruhi paradigma atau proses berpikir dalam proses komunikasi massa. (D’Angelo, 2002). Dalam tulisan lainnya Entman menjelaskan lebih rinci tentang framing bagaimana media menyediakan audiens dengan skema untuk menginterpretasikan peristiwa. Framing adalah memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi masalah tertentu, interpretasi kausal, evaluasi moral, dan/atau rekomendasi (Scheufele, 1999). Disebutkan pula bahwa menurut Entman kajian framing berpusat hanya pada peristiwa pembingkai. Frekuensi siapa mengatribusikan (positif atau negatif) apa kepada siapa melalui media berita, memberikan wawasan mendalam tentang karakteristik bingkai acara. Tapi untuk menganalisis sejauh mana bingkai peristiwa ini sesuai dengan skema kebiasaan keseluruhan yang meliputi masalah, peristiwa dan aktor politik tertentu (Nicole & Karin, 2010). Dalam konsep framing pula, Entman

mengasumsikan bahwasanya komunikator adalah aktor elit layaknya politisi, media, pakar ilmiah dan pemimpin opini lainnya. Sedangkan audien terdiri dari anggota masyarakat umum (Chong & Druckman, 2007).

Penelitian serupa tentang kasus korupsi dalam skala nasional yang dianalisis menggunakan pisau analisis framing Robert Entman diantaranya “Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBC Indonesia.com”. Ditemukan kesimpulan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan perspektif yang dominan pada semua masalah pemerintahan, dengan caranya media mengungkapkan kritik dengan berbagai cara (Leliana et al., 2021). Selanjutnya penelitian yang menggunakan analisis framing Robert Entman tentang kasus korupsi di skala nasional pula yaitu “Analisis Framing Pemberitaan Penahanan Suryadharma Ali di Kompas”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa seleksi isu yang dikonstruksikan dalam pemberitaan ini telah membuktikan sebuah fakta yang memberatkan objek pemberitaan. Penonjolan aspek tertentu dari isu tertentu kini melahirkan kelompok yang berpihak dan kelompok yang menolak (Rachman, 2016). Penelitian berikutnya tentang kasus korupsi di tingkat nasional yang dianalisis menggunakan analisis framing Robert Entman yaitu penelitian berjudul “Ketua KPK Dalam Bingkai Media pada Kasus Korupsi Gubernur Papua di Media Cnnindonesia.Com dan Detik.Com”. Ditemukan kesimpulan bahwa media membingkai objek dengan pemberitaan negatif lewat pelanggaran standar etika penegakan hukum. Dominasi pemberitaan ini mengakibatkan framing buruk terhadap pejabat publik. Hal ini memberikan dampak yang luas terhadap kredibilitas lembaga negara dalam memberikan pelayanan publik (Hildansyah et al., 2022). Penelitian lainnya yang juga menggunakan analisis framing Robert Entman tentang kasus korupsi dalam skala regional

yang berjudul “Analisis Framing Pemberitaan Korupsi Massal di Media Online Detik.Com”. Sebagai kesimpulan bahwa konstruksi pemberitaan yang dibangun oleh media pemberitaan secara keseluruhan cenderung negatif. Uraian-uraian yang ditunjukkan dalam wacana menggiring keberpihakan public (Ananda et al., 2019). Beberapa riset diatas memberikan warna analisis dengan media-media mainstream yang keberpihakannya masih samar-samar. Sedangkan penelitian ini akan terang-benderang melihat posisi pemberitaan pemilik media itu sendiri yaitu Metro Tv dan juga media Tempo.co yang dikenal dengan objektivitasnya. Perbedaan dua sudut pandang yang ditonjolkan oleh kedua kanal youtube yaitu Tempo.co dan Metro TV ini mampu menjadi sebuah kajian ilmiah. Adapun topik ini akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis framing Robert Entman dengan kajian framing yang diklasifikasikan dalam empat bagian di antaranya define problem, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komunikasi Massa

Komunikasi massa menurut Denis Mcquail merupakan sarana komunikasi publik utama yang terorganisir untuk dapat menjangkau sebagian besar populasi tertentu audiens media. Konteks komunikasi massa mungkin tidak memiliki kesamaan sosial lainnya ikatan atau bahkan kesamaan. Komunikasi massa pula merupakan metode komunikasi publik untuk menyatukan gagasan yang berbeda (McQuail, 2016). Dalam literatur yang lain Rens Vliegenthart dalam tulisannya yang berjudul Framing in Mass Communication Research An Overview and Assessment berpendapat bahwa dampak framing dalam komunikasi massa mungkin menentukan bagaimana

politisi bertindak dan kebijakan apa yang sedang dibuat. Bagaimana opini publik pada tingkat makro berubah dan apa yang dianggap tepat atau tidak dalam masyarakat (Vliegenthart, 2012).

Chamdereli (2015) dan Maharramli (2012) dalam beberapa pendekatan mengatakan bahwa esensi komunikasi massa secara singkat sebagai proses mentransmisikan informasi apa pun dari sumber ke audiens yang besar dengan bantuan sarana teknis tertentu. Artinya, seperti namanya, skala penyampaian informasi dalam proses ini adalah sangat besar dan prosesnya lebih masif. Dalam literatur modern tentang sosiologi dan filsafat, konsep “komunikasi massa” adalah proses penyiapan informasi apapun oleh lembaga-lembaga yang terorganisir secara khusus dengan partisipasi sarana teknis dan sistematis (terus menerus, tanpa terputus) mentransmisikannya ke audiens yang besar. Proses berkelanjutan ini bersifat sepihak dan masif, bukan diarahkan ke sasaran tertentu, dan pengirim informasi jauh dari penerima potensial (Zeynalova, 2022).

Dasar dan isi komunikasi massa meliputi kajian semiotika, bahasa dan tuturan, serta genre, teknik, tema, dan peristiwa yang berkaitan dengan jurnalisme pada umumnya dan pers, penyiaran, dan film. Adapun cakupan komunikasi massa berkaitan dengan hubungan masyarakat, telekomunikasi, pers, penerbit individu, surat kabar, radio, televisi, televisi kabel, media baru, film, media cetak, media elektronik lainnya (Williamson et al., 1998). Komunikasi massa muncul sebagai transmisi pesan dari satu sumber kepada audien yang sebagian besar tidak terdiferensiasi yang anggotanya sedikit berinteraksi atau tidak ada sama sekali. Karakterisasi komunikasi massa, ditulis lebih dari dua dekade lalu oleh sosiolog Charles Wright (1959) yang diantaranya sebagai berikut:

1. Karakteristik komunikasi massa diarahkan relatif besar, heterogen, dan audiens anonim.
2. Melibatkan pesan yang dikirimkan secara publik.
3. Menjangkau sebagian besar anggota audien secara bersamaan maupun sementara.
4. Mengalir dari seorang komunikator yang cenderung, atau beroperasi, dalam organisasi yang kompleks (Nimmo, 1981).

Lazarsfeld & Merton (1948) menyatakan bahwa komunikasi massa memiliki efek terukur pada masyarakat atau dengan istilah lainnya adalah *agenda setting*. Efek komunikasi massa tidak ada artinya jika tidak menyeluruh, namun hanya mengatur dua halaman tentang pengaturan agenda, sebagian besar diangkat langsung (Kinder, 1998)

B. Framing Media

Framing media adalah pesan tertulis, lisan, grafis, atau visual modalitas yang komunikator gunakan untuk mengkontekstualisasikan suatu topik, seperti orang, peristiwa, episode, atau masalah, dalam teks yang dikirimkan ke penerima melalui mediasi. Adapun istilah komunikator dapat merujuk pada individu, dipahami sebagai orang yang tidak berafiliasi dengan satu lain, atau kelompok orang yang terletak di dalam organisasi formal (misalnya, staf berita atau organisasi advokasi). Istilah penerima bisa merujuk pada orang perorangan, formal kelompok, dan kelompok orang yang terhubung secara informal (misalnya, anggota audiens atau konstituen). Teks adalah modalitas gabungan yang digunakan komunikator dalam satu kesatuan pesan atau rangkaian pesan. Mediasi mengacu pada produksi dan distribusi proses industri media massa cetak, film, dan elektronik, termasuk yang Berbasis internet dan berbasis aplikasi (atau aplikasi). Kontekstualisasi mengacu pada

tujuan perilaku di mana komunikator menetapkan kerangka acuan untuk suatu topik (D'Angelo, 2017).

Dalam literatur yang lain Paul juga berpendapat bahwa framing adalah landasan teoritis yang telah menghidupkan kembali perhatian ilmiah terhadap komunikasi visual (D'Angelo et al., 2019)

Analisis framing media adalah proses melukiskan dan menggambarkan realita kehidupan sosial sehari-hari dalam media dengan mengadu domba satu sama lain dengan tujuan saling menguntungkan satu sama lain. Istilah yang sedikit jenaka bahwa framing media merupakan bisnis yang licin bagi bagi segelintir orang (Gupta, 2017).

Studi framing Robert Entman terdiri dari dua komponen utama bagaimana topik atau berita dipilih dan bagaimana menyoroti detail tertentu dalam topik atau berita. Penonjolan ini dapat memberikan konteks informasi, intrik, dan potensi untuk menjadi lebih pendengar merasa mudah untuk mengingat (D'Angelo, 2002). Konsep framing yang ditawarkan Entman didasarkan pada pentingnya isu yang mengikat secara berkesinambungan. Mulai pada tingkatan define problems, yaitu tingkatan penjelasan tentang bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh seorang jurnalis. Selanjutnya, diagnose cause identifikasi penyebab dengan membingkai fakta tentang suatu peristiwa dengan maksud untuk menentukan siapa untuk mengidentifikasi aktor utama dalam acara tersebut, masing-masing aktor melakukan bagian di dalamnya. Poin berikutnya, make moral judgment digunakan untuk mendukung argumen yang bertentangan dengan definisi kejadian sebelumnya. Terakhir adalah treatment recommendation yang mencakup solusi yang dipilih untuk mengatasi masalah di acara tersebut (Nicole & Karin, 2010).

Tulisan ini akan mencoba menganalisis framing berita tentang kasus korupsi Johnny G Plate dalam dua berita berbeda yaitu dari kanal youtube

Tempo.co dan kanal youtube Metro TV. Tempo.co membubuhkan judul pemberitaan “Johnny G Plate Tersangka Kasus Menara BTS, Langsung Ditahan” dan Metro TV dengan judul “Plate Tersangka, Tidak Ada Intervensi Politik?” yang dipublikasikan pada tanggal 17 Mei 2023 lalu. Peneliti akan menganalisa kedua berita yang ada dengan menggunakan konsep analisis framing Entman dengan menguraikan bagaimana define problems, diagnose cause, make moral judgment, dan treatment recommendation masing-masing berita.

Tabel 1. Sampel Berita Kasus Korupsi Johnny G Plate

No	Judul	Media
1	Johnny G Plate Tersangka Kasus Menara BTS, Langsung Ditahan	Tempo.co
2	Plate Tersangka, Tidak Ada Intervensi Politik?	Metro TV

Sumber: Peneliti, 2023

C. Analisis Framing di Tempo.co

Secara umum Tempo.co memberikan kabar kepada khalayak bahwasanya penangkapan Johnny G Plate yang statusnya masih aktif sebagai menteri Kominfo selaku pembantu presiden resmi berstatus tersangka kasus

korupsi (BTS) *Base Transceiver Station*. Penahanan Plate dilakukan oleh lembaga negara yaitu Kejaksaan Agung sebagai aparat penegakan hukum yang menangani kasus korupsi ini. Hal ini disampaikan oleh Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Hasil analisis penulis dengan menggunakan analisis framing Robert Entman dari kanal youtube Tempo.co dengan uraian sebagai berikut:



Gambar 1 Suasana setelah Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka dan hendak menuju tahanan

Define problem pemberitaan ini adalah bagaimana jurnalis mencoba memberitakan kasus korupsi yang dilakukan Johnny G Plate yang masih berstatus sebagai menteri Kominfo aktif. Penahanan Plate sebagai tersangka kasus korupsi dari kalangan menteri bukanlah kasus yang pertama di Indonesia, melainkan penetapan Plate sebagai tersangka adalah penangkapan menteri yang telah terjadi yang kesekian kalinya.

Diagnose cause pemberitaan ini dijelaskan oleh jurnalis karena sebab keterlibatan Plate dalam kasus pembangunan BTS Base Transceiver Station dibawah naungan Kominfo. Plate merupakan sosok yang paling bertanggung jawab atas kejadian ini. Oleh Kejaksaan Agung setelah melalui pemeriksaan dan pendalaman kasus Plate langsung berubah status Plate menjadi tersangka.

Make moral judgment pemberitaan ini menunjukkan bahwasanya siapapun pelaku korupsi yang berbuat dan bertindak sehingga merugikan negara, meskipun pejabat pemerintah sekelas menteri pembantu presiden juga mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Treatment recommendation dalam pemberitaan Tempo.co bahwa Kejaksaan Agung yang diwakilkan oleh Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terus berupaya mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan dakwaan hingga terus memburu pihak-pihak yang sejatinya terlibat dalam kasus yang menjerat menteri Kominfo dan pihak-pihak dalam pengadaan pembangunan BTS Base Transceiver Station.

D. Analisis Framing di Metro TV

Secara keseluruhan Metro TV juga memberikan kabar korupsi yang dilakukan oleh Johnny G Plate yang statusnya masih sebagai menteri Kominfo yang aktif. Menariknya Metro TV memiliki gaya yang cukup berseberangan dengan pemberitaan yang dibuat oleh Tempo.co. Dimulai dari bagian awal pemberitaan Metro TV memberikan framing pembelaan untuk tersangka. Diawali dengan kalimat Surya Paloh: Tidak benar ada intervensi politik, dilanjutkan dengan Plate tersangka: tidak ada intervensi politik?, dilanjutkan dengan bagian ketiga Surya Paloh: Plate terlalu mahal untuk diborgol sampai dengan bagian akhir Surya Paloh: Hak Jokowi reshuffle kabinet. Peneliti mencoba melakukan analisis framing Robert Entman terhadap pemberitaan Metro TV diatas dengan uraian berikut:



Define

problem

pemberitaan ini adalah bagaimana sebab Plate menjadi tersangka dalam pemberitaan yang dipublikasikan oleh jurnalis Metro TV. Tidak benar ada intervensi politik sebagai wacana dalam pemberitaan ini menunjukkan terdapat harapan yang besar dari putusan yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum bahwa putusan yang ada dapat berubah.

Diagnose cause pemberitaan ini dijelaskan oleh jurnalis Plate tersangka: bahwa tidak ada intervensi politik? Adapun penyebab penangkapan Plate sebagai tersangka kasus korupsi oleh jurnalistik Metro TV dengan diksi yang seolah tidak meyakini putusan Kejaksaan Agung.

Make moral judgment pemberitaan ini menunjukkan bahwasanya diksi yang dipilih oleh jurnalis Metro TV Surya Paloh: Plate terlalu mahal untuk diborgol seakan kesalahan yang dilakukan tidak pantas diperlakukan demikian. Penolakan yang ditunjukkan oleh jurnalis tentu saja sangat kontras dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Jhonny G Plate.

Treatment recommendation dalam pemberitaan diatas bahwa Surya Paloh: Hak Jokowi reshuffle kabinet. Rekomendasi yang diberikan oleh jurnalis lewat diksi yang ada menunjukkan sikap pasrah atas kebijakan yang

akan diambil oleh presiden selaku kepala negara setelah Johnny G Plate berhenti dari jabatannya sebagai menteri Kominfo.

PENUTUP

Framing yang cukup kontras dapat dilihat dari dua pemberitaan media massa antara Tempo.co dan Metro TV dalam memberitakan kasus korupsi Johnny G Plate dalam pembangunan menara BTS *Base Transceiver Station*. Kedua media yang ada cukup aktif dalam memberikan kabar berita bagi khalayak lewat kanal youtube. Keduanya tentu memiliki alasan yang kuat dalam menggambarkan berita dengan gaya dan ciri khasnya yang dapat dilihat lewat hasil analisis framing Robert Entman diatas. Dalam lingkup *Define problem* dapat dilihat bahwa bagaimana pemberitaan Johnny G Plate sebagai tersangka dapat terjadi. Dilanjutkan dalam lingkup *diagnose cause* sebagai penyebab terjadinya juga terlihat cukup berbeda. Selanjutnya pada lingkup *make moral judgment* sebagai pesan nilai moral pemberitaan kedua media di atas memberikan warna yang sangat berbeda. Pada bagian akhir lingkup *treatment recommendation* sebagai rekomendasi dari tiga bagian sebelumnya kedua media massa yang ada berupaya meyakinkan khalayak bahwa pemberitaan yang disampaikan merupakan berita yang dapat diyakini kebenarannya.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, M. F. S., Nugraha, A. R., & Sumartias, S. (2019). Analisis framing pemberitaan korupsi massal di media online detik.com. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 3(2), 253. <https://doi.org/10.25139/jsk.v3i2.1464>
- Bungsu, A. P. (2019). Citra KPK Pada Kasus Korupsi Menteri Juliari Batubara (Analisis Wacana Kritis Fairclough). *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 1(2), 152–175. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v1i2.48>
- Chong, D., & Druckman, J. N. (2007). Framing Theory. *Annual Review of*

- Political Science*, 10(1), 103–126.
<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054>
- D'Angelo, P. (2002). News framing as a multiparadigmatic research program: A response to entman. *Journal of Communication*, 52(4), 870–888.
<https://doi.org/10.1093/joc/52.4.870>
- D'Angelo, P. (2017). Framing: Media Frames. In *The International Encyclopedia of Media Effects* (pp. 1–10). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781118783764.wbieme0048>
- D'Angelo, P., Lule, J., Neuman, W. R., Rodriguez, L., Dimitrova, D. V., & Carragee, K. M. (2019). Beyond Framing: A Forum for Framing Researchers. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 96(1), 12–30.
<https://doi.org/10.1177/1077699018825004>
- Gupta, S. (2017). *Conclusion : Media-Framing Analysis , One-Word Framing and 'Austerity.'* November.
- Hafidli, M. N., Nur, R., Lestari, D., Nurazhari, L., Rahisa, N., Putri, G., & Science, C. (2023). *Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Kasus.* 3(1), 178–183.
- Hildansyah, I., Nur, M. J., & Pauji, R. R. (2022). Ketua Kpk Dalam Bingkai Media Pada Kasus Korupsi Gubernur Papua Di Media Cnnindonesia.Com Dan Detik.Com. *Jurnal Common*, 6(2), 167–178.
<https://doi.org/10.34010/common.v6i2.8646>
- Kinder, D. R. (1998). COMMUNICATION AND OPINION. *Annual Review of Political Science*, 1(1), 167–197.
<https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.167>
- Leliana, I., Herry, H., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). Analisis Framing Model Robert Entman tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 21(1), 60–67.
<https://doi.org/10.31294/jc.v21i1.10042>
- McQuail, D. (2016). Mass Communication. In *The International Encyclopedia of Political Communication* (pp. 1–12). Wiley.
<https://doi.org/10.1002/9781118541555.wbiepc155>
- Nicole, G., & Karin, H. (2010). *The public attribution of responsibility : an international comparison Panel Track.* December, 1–16.
- Nimmo, D. (1981). Mass Communication and Politics. In *The Handbook of Political Behavior* (pp. 241–288). Springer US.
https://doi.org/10.1007/978-1-4684-3878-9_5
- Rachman, M. A. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Penahanan Suryadharma Ali Di Kompas. Com (Periode Juni 2015). *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2016, 4 (2) : 127 - 141, 4(2), 127–141.

- Scheufele, D. A. (1999). Framing as a Theory of Media Effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103–122. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>
- Undang-Undang RI. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Dewan Perwakilan Rakyat RI*, 1–14. https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2001_20.pdf
- Vliegthart, R. (2012). Framing in Mass Communication Research - An Overview and Assessment. *Sociology Compass*, 6(12), 937–948. <https://doi.org/10.1111/soc4.12003>
- Williamson, S. G., Harvey, K., & Bracken, J. K. (1998). Mass Communication. *Communication Booknotes Quarterly*, 29(1), 42–48. <https://doi.org/10.1080/10948009809361555>
- Zeynalova, A. (2022). *MASS COMMUNICATION*. Scientific Council of Baku State University Faculty of Journalism.